



RENCANA STRATEGIS

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta hasil evaluasi pelaksanaan pada periode sebelumnya. Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan dalam pembangunan pendidikan. Renstra ini dilakukan **revisi** guna menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang melaksanakan pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Banda Aceh, 2 Juli 2022
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh,



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum	6
1.2.1 Kelembagaan	7
1.2.2 Capaian Target Renstra.....	6
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	12
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH.....	13
2.1 Visi.....	13
2.2 Misi	13
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRETAGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	17
3.2.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Aceh	18
3.2.2 Strategi Pelaksanaan Program	20
3.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas	20
3.3 Kerangka Regulasi	24
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	25
3.4.1 Struktur Organisasi.....	25
3.4.2 Reformasi Birokrasi	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1 Target Kinerja	27
4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020 – 2021	27
4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2020 – 2024	28
4.2 Kerangka Pendanaan	30
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia."
(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Hal tersebut selaras dengan dua misi presiden, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang

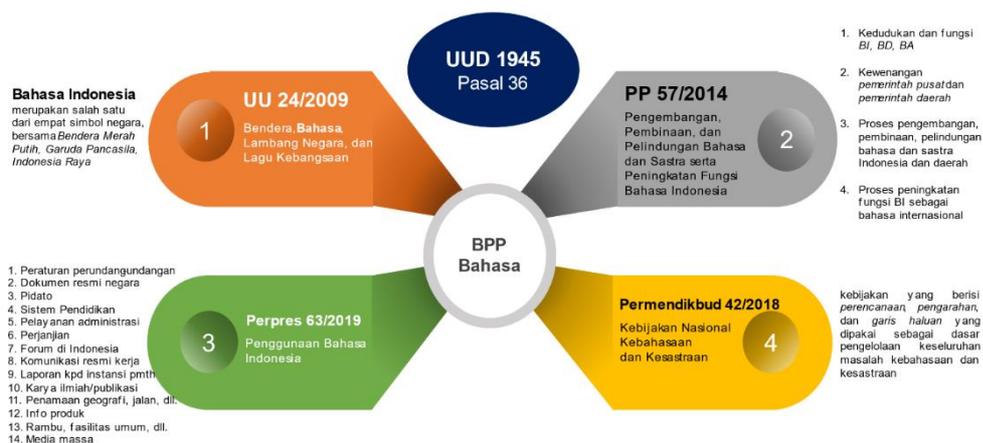
Pembangunan SDM yang dimaksud dalam arahan presiden itu: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Arahan presiden tersebut selaras dengan agenda pembangunan 3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain agenda pembangunan SDM, agenda pembangunan 4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) juga menjadi salah satu agenda penting yang harus dilaksanakan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *bhinneka tunggal ika*. Untuk memperkuat *bhinneka tunggal ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya di Provinsi Aceh merupakan lembaga strategis dalam melaksanakan amanah Agenda Pembangunan 4, yaitu revolusi mental dan pemajuan kebudayaan. mencerminkan kepribadian bangsa.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemendikbudristek, Balai Bahasa Provinsi Aceh berpedoman pada amanat regulasi tentang pengelolaan bahasa sebagai berikut.

Amanat Regulasi tentang Pengelolaan Bahasa



Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Dalam penerapannya, Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh dijadikan acuan dalam menyusun rencana program dan kegiatan selama lima tahun agar selaras dan sejalan dalam pencapaian program prioritas BPP Bahasa.

1.2 Kondisi Umum

Kondisi umum yang berkaitan dengan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan dapat dilihat dari kelembagaan, kebahasaan dan kesastraan di daerah, yaitu Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pengkajian, penelitian, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah.

1.2.1 Kelembagaan

Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah yang resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 226/0/1999. Berdasarkan kepmendikbud tersebut, Balai Bahasa Aceh memiliki tugas melaksanakan pengkajian/pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang bahasa dan sastra.

1.2.2 Capaian Target Renstra

a. Capaian Tahun 2015 – 2019

MENINGKATNYA KOSAKATA BAHASA INDONESIA

JUMLAH KOSAKATA INDONESIA	
2015	-
2016	1000
2017	1000
2018	4000
2019	2000

MENINGKATNYA MUTU DAN JUMLAH PENELITIAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

JUMLAH PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA	
2015	-
2016	-
2017	-
2018	2
2019	1

MENINGKATNYA MUTU DAN JUMLAH PENELITIAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

JUMLAH PUBLIKASI ILMIAH BAHASA DAN SASTRA	
2015	-
2016	-
2017	-
2018	2
2019	2

MENINGKATNYA MUTU DAN JUMLAH BAHAN AJAR PENGAYAAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

JUMLAH BAHAN DAN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA	
2015	-
2016	-
2017	2
2018	2
2019	6

MENINGKATNYA JUMLAH INSTRUMEN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

JUMLAH INSTRUMEN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA	
2015	-
2016	-
2017	-
2018	1
2019	-

MENINGKATNYA JUMLAH TENAGA PROFESIONAL DAN CALON TENAGA PROFESIONAL YANG TERBINA DALAM PENGGUNAAN BAHASA DAN SASTRA

JUMLAH TENAGA PROFESIONAL DAN CALON TENAGA PROFESIONAL YANG TERBINA DALAM PENGGUNAAN BAHASA DAN SASTRA	
2015	710
2016	597
2017	550
2018	1650
2019	1400

MENINGKATNYA JUMLAH TENAGA PROFESIONAL DAN CALON TENAGA PROFESIONAL YANG TERBINA DALAM PENGGUNAAN BAHASA DAN SASTRA

JUMLAH GENERASI MUDA PENGAPRESIASI BAHASA DAN SASTRA	
2015	901
2016	5790
2017	764
2018	1747
2019	1415

MENINGKATNYA JUMLAH RUANG PUBLIK YANG TERKENDALI

JUMLAH BADAN PUBLIK YANG TERKENDALI PENGGUNAAN BAHASANYA	
2015	-
2016	-
2017	5
2018	4
2019	27

MENINGKATNYA JUMLAH RUANG PUBLIK YANG TERKENDALI

JUMLAH BADAN SWASTA YANG TERKENDALI PENGGUNAAN BAHASANYA	
2015	-
2016	-
2017	10
2018	5
2019	5

MENINGKATNYA JUMLAH MUTU DAN JUMLAH BAHAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

JUMLAH BAHAN AJAR BIPA	
2015	-
2016	-
2017	-
2018	5
2019	3

b. Capaian Tahun 2020 – 2021

	2020	2021
SK 1 Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia		
Pencapaian SK Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia diperoleh melalui (1) IKK Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia. Pada tahun 2020 tidak ada target jumlah kosakata Bahasa Indonesia sehingga capaiannya 0%. Pada tahun 2021 jumlah kosakata Bahasa Indonesia tercapai 1000 Kosakata dari 1000 kosakata.	-	100%
SK 2 Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia		
Pencapaian SK Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa 100% Indonesia melalui IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. Tahun 2020, tercapai 1 Dokumen Penelitian. Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan dan anggaran untuk IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian sehingga capaiannya 0.	100%	0%
SK 3 Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik		
Pencapaian SK Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik diperoleh melalui IKK Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia tercapai 8 lembaga dari target 8 lembaga. Pada Tahun 2021 IKK Jumlah Lembaga pengguna Bahasa Indonesia tercapai 68 Lembaga dari Target 104 Lembaga.	100%	160%
SK 4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina		
Pencapaian SK Meningkatnya jumlah penutur Bahasa terbina diperoleh melalui IKK jumlah tenaga professional dan calon tenaga professional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra pada tahun 2020 tercapai 1.050 orang dari target sebanyak 1.050 orang. Untuk tahun 2021 IKK jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra tercapai 704 orang dari target 704 orang.	100%	100%
SK 5 Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan terancam punah		
Pencapaian SK Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang kritis dan terancam punah diperoleh melalui (1) IKK Jumlah Penutur muda yang terlibat dalam perlindungan Bahasa daerah kritis dan terancam punah pada tahun 2020 tercapai 36 orang dengan target 36 orang, pada tahun 2021 tercapai tidak ada anggaran dan target pada ikk ini. (2) IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah pada tahun 2020 18 orang dari target 18 orang, sementara pada tahun 2021 tercapai 100 orang dari target 100 orang (3) IKK Jumlah Produk kesastraan terkembangkan pada tahun 2020 tercapai 2 sastra dari target 2 sastra. Tahun 2021 target 2 sastra tercapai 3 sastra.	100%	150%
SK 6 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa		
Pencapaian SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa melalui (1) IKK Predikat Sakip satker minimal BB pada tahun 2020 tercapai B. Pada tahun anggaran 2021 dari target BB tercapai BB. (2) IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91 pada tahun 2020 tercapai 93. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 88,08 dari target 92.	100%	95,74%

1.3 Potensi dan Permasalahan

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap, b. Lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Aceh, c. SDM memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat, d. Tersedianya produk kodifikasi sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yang terintegrasi dengan TIK, e. Tingginya jumlah pengguna KBBI, f. Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA, g. Tersedianya sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia, dan h. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai i. Memiliki gedung/kantor sendiri 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi, b. Jumlah SDM yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan, c. SDM belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat, d. Standar Kompetensi Lulusan BIPA belum terimplementasi secara penuh, e. Belum semua produk dan layanan kebahasaan termanfaatkan dalam mendukung peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, f. Kurang lengkapnya data bahasa dan sastra daerah, g. Belum adanya evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah, h. Kurangnya produk kodifikasi sebagai penunjang bahan ajar untuk internasionalisasi bahasa Indonesia dan literasi berbahasa daerah, i. Belum disahkannya peta jalan pembudayaan literasi yang mengintegrasikan program literasi di berbagai instansi
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa, b. Dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia, c. Beberapa daerah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan bahasa dan sastra, d. Adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan Balai Bahasa 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas politik dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, b. Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, c. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca,

<p>Provinsi Aceh dapat mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, internet, dan lainnya,</p> <p>e. Literasi membaca menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terhadap siswa Indonesia,</p> <p>f. Banyak masyarakat/penulis yang antusias mengikuti sayembara Penerjemahan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh,</p> <p>g. Banyak komunitas literasi yang aktif melakukan praktik baik berliterasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat,</p> <p>h. Peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang terseleksi sebagai Duta Bahasa, dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra,</p> <p>i. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan ahli Bahasa,</p> <p>j. Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang siap dan terbuka bagi semua kalangan.</p>	<p>d. Adanya ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik Balai Bahasa Provinsi Aceh,</p> <p>e. Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat,</p> <p>f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk kodifikasi,</p> <p>g. Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami,</p> <p>h. Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di wilayah Aceh,</p> <p>i. Pemerintah daerah sebagai pelaku utama tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas</p>
--	---

Masalah

- a) Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia yang dapat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
- b) Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022.
- c) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa disertai dengan dukungan regulasi tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang cukup lengkap. Namun, dalam realitasnya, regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi serta sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat.
- d) Budaya membaca di Provinsi Aceh masih tergolong rendah, berdasarkan data dari Pustaka Wilayah, hanya 7,4 persen warga Kota Banda Aceh yang berkunjung ke Pustaka Wilayah dan setiap tahunnya mengalami penurunan.

- e) Dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia, jumlah negara yang memiliki program BIPA hingga 2022 mencapai 50 negara. Namun, di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami.
- f) Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 718, tetapi pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah belum sepenuhnya menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama. Hal ini terjadi di Provinsi Aceh, yang memiliki dua bahasa daerah besar yaitu Aceh dan Gayo. Bahasa Gayo kini termasuk dalam bahasa yang kritis diakibatkan berkurangnya penutur muda yang mengimplementasikan bahasa Gayo di kehidupan sehari-hari.

Strategi

- 1) Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra,
- 2) Seluruh satuan kerja di BPP Bahasa harus melakukan akselerasi dalam mengamplifikasi dan mengoordinasi dukungan berbagai pihak dalam upaya pencapaian misi BPP Bahasa,
- 3) Optimalisasi kualitas SDM dalam layanan kebahasaan bersama dengan penguatan digitalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan,
- 4) Program beserta produk literasi BPP Bahasa harus tepat sasaran dengan mengoptimalkan komunitas literasi dan pegiat bahasa dan sastra,
- 5) Membentuk kegiatan di Provinsi Aceh yang menarik perhatian publik agar generasi muda tertarik untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Daerah dan menguasai bahasa Asing,
- 6) Memperluas jaringan dan publikasi terhadap pelaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Aceh,
- 7) Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih agresif.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa, Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melaluipengembangan dan pembinaan bahasa.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh dilengkapi dengan misi untuk mencapai visi tersebut sebagai berikut.

- 1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.**
- 2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional**
- 3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.**
- 4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.**

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, **Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan tujuan strategis lembaga** yaitu (1) melakukan layanan profesional kebahasaan di daerah Provinsi Aceh; (2) melakukan perlindungan bahasa dan sastra di daerah Provinsi Aceh yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat di daerah dan melakukan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju di Provinsi Aceh; dan (3) melakukan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi di Provinsi Aceh yang ditopang oleh teknologi digital, serta mendorong terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di daerah Provinsi Aceh yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2024) yaitu, (1) Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Indikator Pencapaian target renstra 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81 (Indeks)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7 (Indeks)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
		Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87 (Indeks)

Sasaran Program

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh berasal dari sasaran program (SP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tujuan kegiatan tersebut mengadopsi Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan 4 Sasaran Program, yaitu:

SP 1	SP 2	SP 3	SP 4
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknolog

Sebagai kontribusi Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam perannya mendukung unit eselon I mencapai sasaran programnya, maka Indikator Kinerja Tujuan Balai Bahasa Provinsi Aceh ditentukan seperti tabel berikut.

Tujuan Kegiatan BBP Aceh	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	72
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	91,99
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia	Negara	50
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	PRedikat	A

Sasaran Kegiatan

Sebagai unit kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan. Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target		
				2022	2023	2024
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	-	2	2	2
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	18	22	23	23
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra					
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	-	565	582	600
SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	8	45	45	45
IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	-	40	40	40
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan					
SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA					
IKK	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	-	45	45	45
SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa					
IKK	Jumlah produk penerjemahan	Produk	-	5	29	29
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Balai Bahasa Provinsi Aceh					
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh					
IKK	Predikat SAKIP Satker Balai Bahasa Provinsi Aceh	Predikat	BB	BB	BB	BB
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Balai Bahasa Provinsi Aceh Minimal 91	Nilai	91	91	91	91

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan **Merdeka Belajar** yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut.



Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.

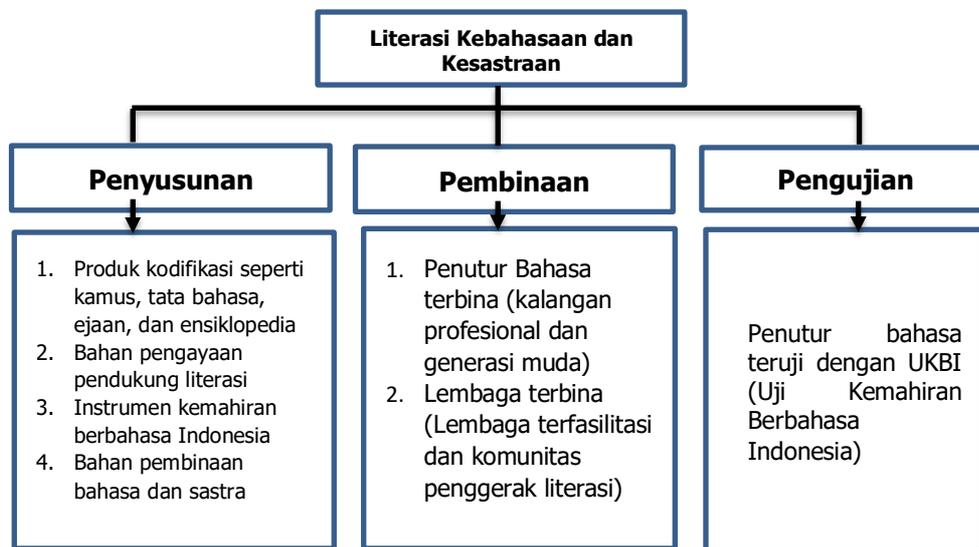


3.2.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Aceh

Balai Bahasa Provinsi Aceh yang merupakan UPT Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, arah kebijakannya juga mengaju pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

Fokus kebijakan pertama ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*.

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Balai Bahasa Provinsi Aceh menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.



Fokus kebijakan kedua ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan

ikut penuh. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia.

3.2.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Berdasarkan jenis kepakaran yang ada di BPP Bahasa, terdapat tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKLP Perkamusan dan Peristilahan, (2) KKLP Pelindungan dan Pemodernan sastra, (3) KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKLP Literasi, (5) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKLP Penerjemahan.

Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional



3.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun yaitu dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka. Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka ini merupakan suatu bentuk upaya sosialisasi agar peserta yang mengikuti uji kemahiran Bahasa Indonesia diharapkan dapat berkomitmen untuk menerapkan atau mensyaratkan UKBI sebagai sebuah standar. Selain itu, program di Balai Bahasa Provinsi Aceh pada fokus kebijakan pertama dicapai dari kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa melalui BIMTEK bagi guru, penulisan Karya Tulis Ilmiah, Bengkel Sastra, dan peningkatan apresiasi sastra yang berupa festival sastra.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. **Di Provinsi Aceh**, jumlah komunitas literasi yang terdata sebanyak 51 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 terdapat 40 komunitas baru yang dicapai dari kegiatan pemutakhiran profil komunitas literasi. Selain dari komunitas literasi terdapat pula beberapa komunitas sastra. Komunitas ini nantinya

akan diberikan bantuan pemerintah guna mendorong keaktifan komunitas dalam melahirkan karya kebahasaan dan kesastraan dengan keunikan daerah tersendiri.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, **Balai Bahasa Provinsi Aceh** mengusulkan Bahasa Gayo sebagai Bahasa yang harus dilakukan revitalisasi kerana tingkat kepunahannya berada di tipe B. Dari hal ini, kegiatan revitalisasi yang akan dilaksanakan berupa lomba menulis cerita pendek Bahasa daerah, lomba membaca puisi Bahasa daerah, hingga lomba berpidato dalam Bahasa daerah. Kegiatan ini akan dikemas dalam rangkaian kegiatan yang menarik sehingga penutur muda Bahasa daerah semakin termotivasi untuk melestarikan Bahasa daerahnya sendiri.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa. Fokus BIPA di Provinsi **Aceh** berupa bimbingan teknis untuk tenaga kerja asing serta pengajar BIPA mengingat jumlah tenaga kerja asing dan pelajar asing yang masuk ke Aceh meningkat seiring bertambahnya beberapa perjanjian kerjasama antar universitas di Aceh dengan luar negeri.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu, (1) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (2) Peningkatan kompetensi pegawai, dan (3) Evaluasi program 2020—2024.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama. Dalam upaya untuk penyelesaian regulasi jabatan Widyabasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh mempersiapkan dokumen pendukung seperti dokumen capaian pelaksanaan program agar mempermudah untuk perhitungan beban kerja.

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang tergabung dalam KKLK maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk

mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

3.3 Kerangka Regulasi

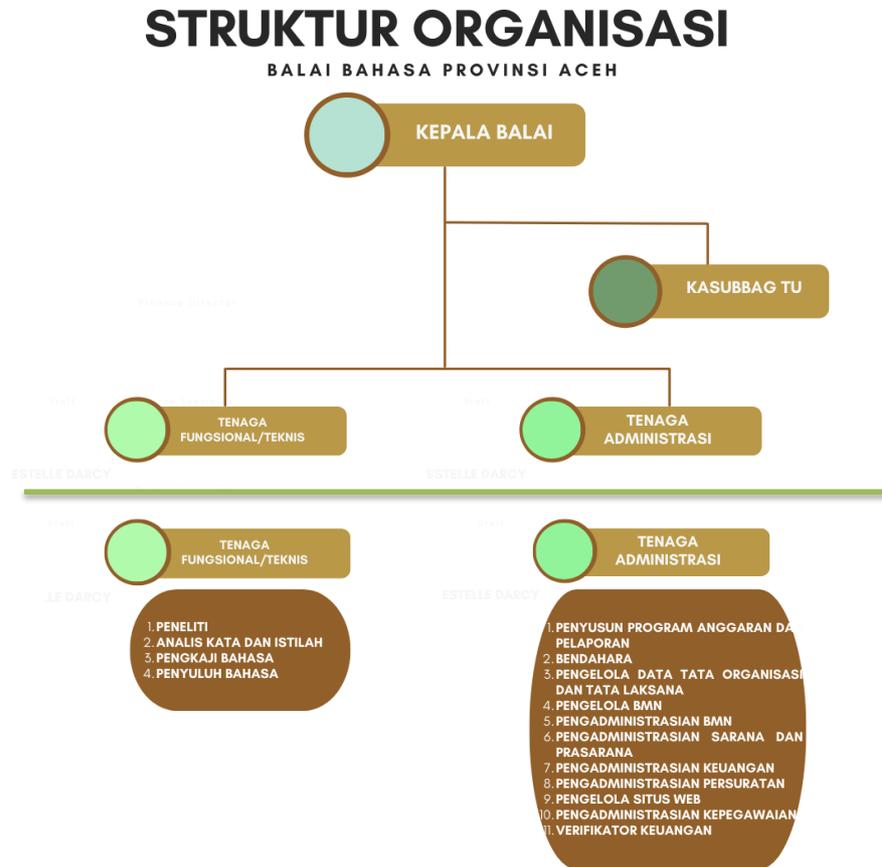
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Aceh membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1.	RSKKNi bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA
3.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
4.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUIPI, dan pedoman lainnya
5.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing
6.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
7.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia
8.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017
9.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Aceh dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:



3.4.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Balai Bahasa Provinsi Aceh melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. layanan peserta didik;
 - b. layanan satuan pendidikan;
 - c. layanan substansi pendidikan;
 - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. layanan kebudayaan;

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan satu sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari dua program. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai beriku

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
SK	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia				
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	1	1	-
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia				
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	-	-	1.000
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra				
SK	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik				
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga		8	68
SK	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina				
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang		1.050	704
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah				

SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah					
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang			36	-
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang			18	100
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	1		2	2
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh					
IKK	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	B		BB	BB
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90		91	92

4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target		
				2022	2023	2024
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	-	2	2	2
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	18	22	23	23
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra					
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	-	565	582	600
SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan					
IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	8	45	45	45
IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	-	40	40	40
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan					
SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA					
IKK	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	-	45	45	45

SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa					
IKK	Jumlah produk penerjemahan	Produk	-	5	29	29
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh					
IKK	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Aceh minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	91	91	91

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan.

Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2020—2024 dibagi ke dalam tiga periode berikut ini.

Periode TA 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (ribu)
023.13.10	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	6.007.512
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	6.007.512

Periode TA 2021

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (ribu)
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.342.253
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	1.342.253
023.WA	Dukungan Manajemen	5.035.478
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.035.478
Total		6.377.731

Periode 2022—2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN		
		2022	2023	2024
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	278.006	290.433	303.487
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	1.126.918	1.180.651	1.237.140
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	238.043	863.184	889.080
023.WA	Dukungan Manajemen			
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	5.354.000	5.816.040	5.599.121
Total		6.996.967	8.150.308	8.028.828

4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta unit internal terkait.

Pemantauan dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, antara lain, MoLK Kemdikbud (Monitoring dan Laporan keuangan), SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), e-monev PP 39 Bappenas, Simproka Kemdikbud, dan e-kinerja Kemdibud.

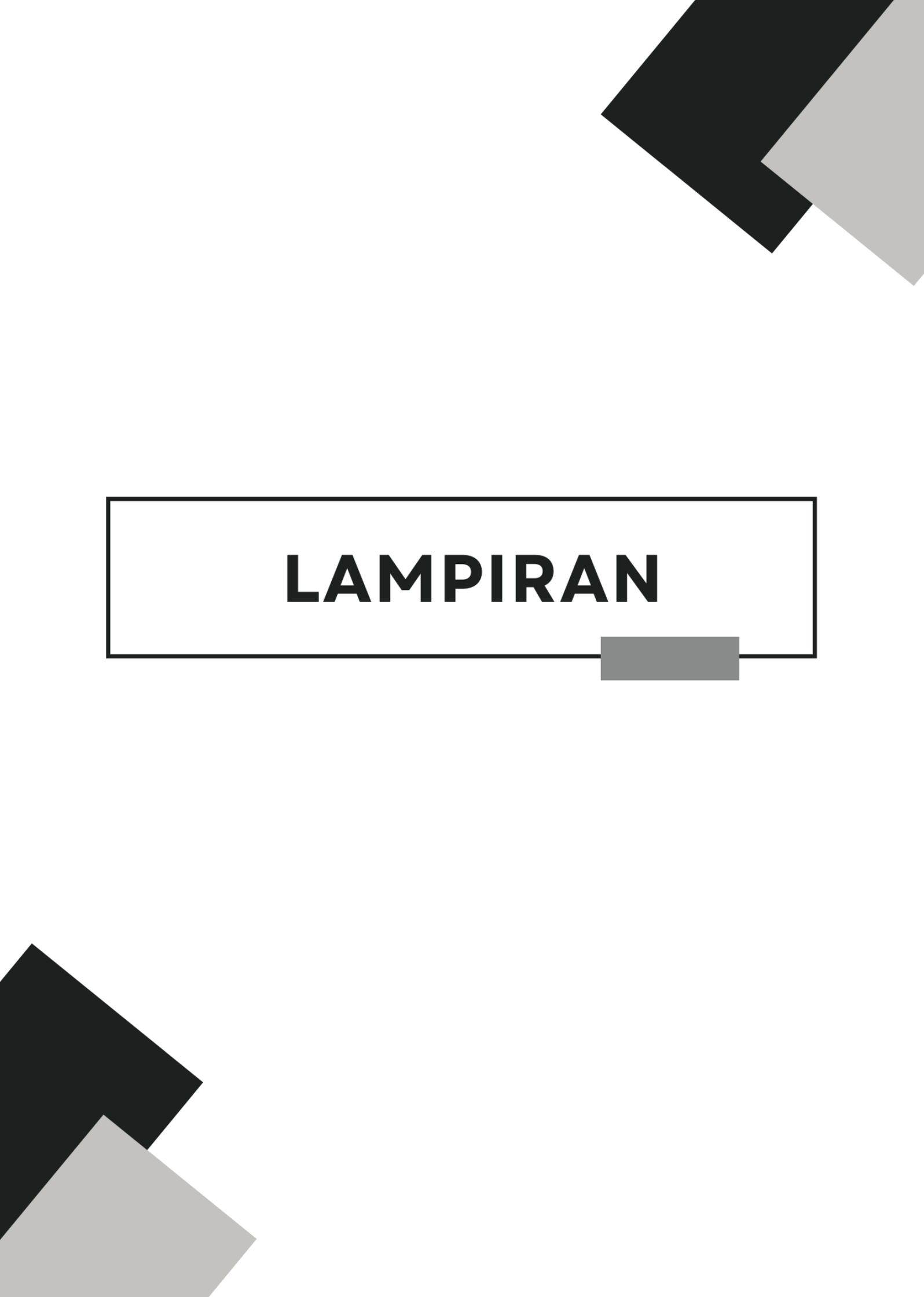
Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan, kemajuan, identifikasi, permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran serta antisipasi/upaya pemecahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Evaluasi dilaksanakan secara objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Dengan kata lain, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

BAB V PENUTUP

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan bahasa mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Aceh Khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah sebagai perpanjangan tangan Badan Bahasa yang menaungi.



LAMPIRAN



Lampiran I: Matriks

Definisi Operasional Tujuan Strategis

No	Tujuan Strategis	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan			
	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini menunjukkan kemampuan penutur dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis, serta kemahiran merespons kaidah bahasa Indonesia. Kelima hal tersebut terangkum dalam tes kemahiran berbahasa UKBI. UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Namun, dalam indikator ini sasaran UKBI ialah penutur bahasa Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beragam profesi dan tingkat pendidikan (guru, dosen, pelajar, mahasiswa, peneliti, penulis, penerjemah, wartawan, juru bahasa, dan profesional lain).	Nilai rata-rata merupakan nilai pertengahan yang diperoleh dari jumlah skor seluruh peserta dibagi jumlah peserta uji.

	<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunj</p>	<p>Langkah-langkah penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, 2. Proses seleksi indikator, 3. Indikator hasil seleksi, 4. Normalisasi indikator, 5. Penentuan bobot tiap dimensi, 6. Penghitungan IPK.
--	--------------------------------------	---	--

Meningkatnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas																																												
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	<p>Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}}{\text{Satker Jumlah Satker}}$ <p>Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut: Nilai Predikat Interpretasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> >90-100 AA Sangat Memuaskan >80-90 A Memuaskan >70-80 BB Sangat Baik >60-70 B Baik >50-60 CC Cukup (memadai) >30-50 C Kurang 0-30 D Sangat Kurang 																																									
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tahun berjalan.	<p>Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020: Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil</p> <table border="1" data-bbox="1182 962 1832 1390"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai/Angka</th> <th></th> <th>Predikat dan Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>90 - 100</td> <td>Istimewa</td> <td>Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80 - 90</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Baik</td> <td>Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Cukup Baik</td> <td>Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50 - 60</td> <td>Cukup</td> <td>Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Buruk</td> <td>Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Buruk</td> <td>Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kategori	Nilai/Angka		Predikat dan Interpretasi	1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.	2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.	3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.	4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.	5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.	6.	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.	7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.
No.	Kategori	Nilai/Angka		Predikat dan Interpretasi																																								
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.																																								
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.																																								
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.																																								
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.																																								
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.																																								
6.	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.																																								
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.																																								

Lampiran III: Matriks

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

SK 1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
IKK 1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra			
	Definisi	Metode Perhitungan	Sumber Data	PIC
	<p>Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.</p>	<p>Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu Satuan: Produk Tipe Penghitungan: kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Perkamusan dan Peristilahan KKLP Pengembangan Sastra</p>

SK 2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan			
IKK 2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan			
	<p>Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.</p> <p>Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.</p> <p>Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.</p>	<p>Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut $JPT = \sum P$</p> <p>Keterangan: JPT = Jumlah Penutur terbina P = Peserta kegiatan</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Literasi, KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLP UKBI</p>
SK 3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan			
IKK 3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya			
	<p>Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.</p> <p>Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).</p> <p>Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, pengumpulan data (naskah dinas, Surat Perjanjian Kerja, Papan Pengumuman dan Himbauan), sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta</p>	<p>Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $JLT = \sum L$</p> <p>Keterangan: JLT = Jumlah lembaga terbina L = Lembaga yang dibina</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum</p>

	pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.			
IKK 3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina			
	<p>Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan tingkat dasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.</p>	<p>Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Satuan: lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Literasi, KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum</p>
SK 4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA			

IKK 4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)			
	<p>Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.</p> <p>Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.</p>	<p>Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.</p> <p>Satuan: orang Tipe penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP BIPA</p>
SK 5	Tersedianya produk diplomasi bahasa			
IKK 5.1	Jumlah produk penerjemahan			
	<p>Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen</p>	<p>Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.</p> <p>Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Penerjemahan</p>

	negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.			
SK 6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah			
IKK 6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah			
	<p>Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.</p> <p>Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.</p> <p>Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang</p>	<p>Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.</p> <p>$A = B + C$</p> <p>Keterangan:</p> <p>A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra</p> <p>B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa</p> <p>C = Jumlah partisipan perlindungan sastra</p> <p>$B = M+N$</p> <p>Keterangan:</p> <p>B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa</p> <p>M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi</p> <p>N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Kepala Balai Bahasa KKLP Pelindungan</p>

	<p>dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.</p> <p>Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.</p> <p>Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.</p> <p>Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa</p> <p>Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.</p>	<p>$C = X + Y$</p> <p>Keterangan:</p> <p>C = Jumlah partisipan perlindungan sastra</p> <p>X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi</p> <p>Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra</p> <p>Satuan: Orang</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>		
SK 7	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh			
IKK 7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Aceh minimal BB			
	<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro</p> <p>Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek</p>	<p>Kepala Balai Bahasa</p> <p>Kasubbag Umum</p> <p>Tim SAKIP dan LAKIP</p>

	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).</p>	<p>Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <p>Satuan: Predikat</p> <p>Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	
IKK 7.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91			
	<p>Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p>Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%</p> <p>Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran,</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran:</p> <p>Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]</p> <p>Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Nilai Kinerja</p> <p>>90% Sangat Baik</p> <p>>80%-90% Baik</p> <p>>60%-80% Cukup</p> <p>>50%-60% Kurang</p> <p><%50 Sangat Kurang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SMART DJA (EKA) 2. Aplikasi OM SPAN (IKPA) 	<p>Kepala Balai Bahasa Kasubbag Umum</p> <p>Tim Pengelola Keuangan dan Pelaporan Keuangan</p>

	<p>efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p> <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan</p>	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>		
--	--	--	--	--

**Penjabaran (Cascading) Sasaran dan Indikator Rencana Strategis
Balai Bahasa Provinsi Aceh
TA 2020--2024**

SS	IKSS	SP	IKP		SK	IKK		RO		
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA.001 2021.DDA.002	Produk kodifikasi bahasa Produk pengembangan sastra	
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.3	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC.001 2022.QDC.002 2022.QDC.003	Penutur bahasa terbina Penutur bahasa teruji Generasi muda terbina program literasi	
			3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.BDB.001	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	
						3.1.2.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	2022.BDB.002	Komunitas penggerak literasi terbina	
	3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.3.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6702.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA
						Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2	Jumlah produk penerjemahan	6702.DDA.002	Produk Penerjemahan
				3.2.8	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	3.2.8.2	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC.001	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.11	Predikat SAKIP Balai Bahasa Aceh	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Aceh	5.3.11.1	Predikat SAKIP Minimal BB	2020.EBA.962	Layanan Umum	
								2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	
	5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.10	predikat ZI-WBK/WBBM	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Aceh	5.4.10.1	Nilai kinerja anggaran minimal 91	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	
								2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	

Matriks Semula – Menjadi Renstra Revisi 2022

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian 2015—2019	1. Capaian 2015—2019 2. Capaian 2020—2021
	1.2 Permasalahan dan Potensi	Penjelasan permasalahan berdasarkan sasaran program	Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT
2.	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbud	Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek dan BPP Bahasa
		b. Narasi misi serupa dengan visi	Penajaman dan penyelarasan misi, tujuan, dan sasaran
		c. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 2022—2024 mengacu target kinerja yang sudah ditetapkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2022—2024 setiap unit pusat maupun UPT
		d. Terdapat indikator keberhasilan misi	Dihapus
		e. Terdapat indikator keberhasilan tujuan strategi	Dihapus
		f. Terdapat tata nilai kelembagaan	Dihapus
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan		
		1. Arah kebijakan BPP Bahasa disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia) Diturunkan menjadi arah kebijakan Balai Bahasa Provinsi Aceh
		2. Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)

		3.	Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang Widyabasa
4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan			
			Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020	<p>Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022</p> <p>Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)</p> <p>Sasaran dan indikator kinerja kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh adalah turunan dari BPP Bahasa</p>
5.	BAB V Penutup			
			-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran			
			Definisi operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi operasional 2. Matriks <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cascading</i> b. Matriks sasaran, indikator, target, dan anggaran c. Matriks Semula-Menjadi sasaran dan indikator Dokumen pendukung lain.